

Gerakan Pembangunan Kelautan

(Tanggapan atas Gerbang Mina Bahari)

Thomas Nugroho

"Mewujudkan Gerbang Mina Bahari (GMB)" dimuat harian *Kompas* tanggal 30 April 2003 untuk dicermati. Pada harian tersebut, De- n Kelautan dan Perikanan menawarkan GMB i gerakan pembangunan perikanan dan kelautan. ut hemat penulis, terlalu sederhana menyebut n GMB yang digagas DKP sebagai gerakan ngunan kelautan.

MUNCULNYA gerakan GMB semakin memper- tegas bahwa tugas yang diem- secara riil adalah per- ukan kelautan. Terlalu nyerahkan sepenuhnya ng jawab pembangunan hanya pada institusi ah, dalam hal ini ab, pembangunan ke- mempunyai dimensi ngat luas, yaitu bukan mengembangan po- rikanan yang selama ini n oleh DKP.

ada DKP, pemba- kelautan sudah berja- dahulu. Namun, hing- pembangunan ke- erjalan tanpa arah. un kelautan selama nkan oleh beberapa in- rintahan, antara la- rtermen Energi dan Daya Mineral, Perhu- Pariwisata, Perindustri Perdagangan, Keu- ngkungan Hidup, dan Meskipun pembangu- an selama ini berjalan ah, kontribusinya ter- erekonomian nasional ada DKP mencapai se- persen

n DKP meningkatkan pembangunan per- elalui gerakan peraba- rikanan patut dipuji. nat disesalkan gerak- ngunan perikanan ala tu GMB; meniru for- n, dan model pemba- gaya Orde Baru. Ada catatan yang patut ewaspadaan bersama gerakan GMB ini, ya-

Pertama, gagasan GMB sa- ngat neoliberal. Hal ini terlihat dari tujuannya yang sangat me- nekankan pada pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi semata. Dengan gerakan GMB, kepen- tingan pemilik modal untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan baik di darat maupun di perairan laut Nusantara akan terfasilitasi. Di samping itu, dikhawatirkan GMB akan menjadi pintu masuk para pem- buru rente ekonomi dalam me- lakukan eksploitasi sumber da- ya perikanan.

Kedua, gagasan GMB terlalu mengikuti *mainstream* pemba- ngunan pertanian. Sebab, latar belakang konsep GMB meniru logika konsep swasembada pa- ngan yang pernah dikembang- kan Departemen Pertanian yang notabene pada masa lalu mengalami kegagalan. Gerakan GMB akan mendorong berkem- bangnya pola-pola ekstensifikasi dan intensifikasi dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Padahal, po- la-pola yang demikian akan mengancam kelestarian dan ke- berlanjutan sumber daya per- ikanan dan aktivitas pemanfa- atannya.

Ketiga, GMB lebih berorien- tasi pada peningkatan produksi perikanan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Ori- ntasi gerakan GMB sama sekali bukan untuk meningkatkan ke- sejahteraan dan kemakmuran masyarakat nelayan dan pem- budidaya ikan skala kecil. Tetapi, cenderung berorientasi pada kepentingan pemilik mo- dal yang mampu melakukan eks- ploitasi sumber daya perikan- an skala besar.

Keempat, dalam menyusun konsep GMB tidak melalui pembahasan yang melibatkan peran publik secara luas, baik dari tingkat pusat maupun da- erah. Proses penyusunan GMB sangat terpusat atau bersifat *top down*, hal demikian yang menyebabkan tertutupnya pe- luang partisipasi publik dalam membahas program pemba- ngunan perikanan.

Dengan konsep GMB, DKP cenderung akan mendorong ter- jadinya eksploitasi sumber daya perikanan secara besar-besaran dengan memprioritaskan inves- tasi skala besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Ada kesan DKP lebih memprioritaskan pengembangan perikanan skala besar ketimbang perikanan rakyat. Padahal, kondisi per- ikanan nasional didominasi oleh perikanan rakyat, yaitu se- kitar 90 persen. Dengan konsep GMB ini dikhawatirkan, nasib perikanan rakyat semakin tidak menentu alias akan telantar kembali seperti pada masa la- lu.

Dari penjelasan di atas men- unjukkan bahwa gerakan GMB merupakan kebijakan yang kontrareformasi. Sebab, kebijakan tersebut sama sekali tidak mengindahkan tuntutan reformasi, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan, terutama nelayan kecil yang pada masa lalu sangat di- telantarkan. Skala usaha tra- disional sangat mewarnai ke- giatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil. Kondisi demikian cenderung merata di seantero Nusantara dan merupakan representasi tingkat aktivitas perikanan rak- yat di Indonesia. Perikanan rak- yat selama Orde Baru hingga saat ini kurang mendapat ap- resiasi dari pemerintah. Pada- hal, apabila perikanan rakyat diberdayakan, bukan tidak mungkin akan mampu meng- gerakkan pembangunan per- ikanan nasional.

Oleh karena gerakan GMB ini tidak akan memberikan faedah bagi masyarakat perikanan, maka sebaiknya program GMB ini dibatalkan saja. Lebih baik pemerintah mengembangkan program-program pembangu- an perikanan yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Misal, program pemba- ngunan perikanan yang bertu- juan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi bagi para nelayan.

Persoalan bidang penangkap- an perikanan yang sampai saat ini belum juga dapat diatasi adalah pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh ne- layan-nelayan asing yang meng- gunakan kapal-kapal ikan de- ngan teknologi tinggi. Kalau ingin menyelesaikan masalah pencurian ikan jangan kemu- dian yang disalahkan pihak la- in, seperti lemahnya pihak ke- amanan dalam pengawasan wi- layah perairan laut.

Yang lebih penting untuk di- atasi adalah meningkatkan pe- nguasaan teknologi penang- kapan ikan nelayan-nelayan Indonesia. Karena, nelayan In- donesia yang memiliki kapal ikan dengan teknologi tinggi bisa dihitungkan dengan jari. Kalau saja Indonesia mempunyai ri- buan bahkan jutaan kapal ikan dengan teknologi tinggi dan ter- sebar di seluruh perairan Nu- santara, maka masalah *illegal fishing* ini otomatis akan hilang dengan sendirinya. Sebab, de- ngan penguasaan teknologi tinggi para nelayan akan mamp- u turut mengawasi wilayah perairan laut teritorial negara Indonesia sehingga kerugian yang sering kali diderita In- donesia akibat *illegal fishing*, yang menurut catatan pemerintah mencapai sekitar 4 miliar dollar AS (Rp 28 triliun dengan kurs Rp 8000) per tahun, dapat di- atasi. Tidak bisa dibayangkan sudah berapa ribu triliun ru- piah negara Indonesia telah di- rugikan dari *illegal fishing* ini selama masa Orde Baru.

Alternatif program yang da- pat dikembangkan adalah program modernisasi nelayan, yaitu dengan memberlakukan standarisasi teknologi armada penangkapan ikan. Standardi- sasi ini dimaksudkan agar ada batasan kemampuan teknologi penangkapan ikan yang harus dikuasai oleh para nelayan. Tu- juannya adalah agar suatu saat mayoritas nelayan Indonesia menguasai teknologi penang- kapan ikan dengan armada yang modern seperti halnya pa- ra nelayan negara asing, yaitu Thailand, Taiwan, Jepang, dan Filipina. Program modernisasi nelayan juga harus didukung oleh infrastruktur perikanan yang modern.

Hal yang sama juga harus di- lakukan pada perikanan budi- daya. Di bidang budidaya per- ikanan, masalah yang dihadapi relatif sama dengan perikanan tangkap, yaitu lemahnya pe- nguasaan IPTEK. Tidak heran bila investasi budidaya yang pernah terjadi pada masa lalu hingga saat ini dikuasai oleh pihak asing. Harus diingat ba- wa investasi pihak asing yang terjadi di Indonesia selama ini motifnya hanyalah eksploitasi sumber daya alam dan manusia; tidak mengindahkan aspek ke- adilan, kesejahteraan, dan ke- lestarian lingkungan. Hal de- mikian pernah terjadi di Lam- pung, yaitu investasi yang di- lakukan oleh PT Dipasena Citra Dramaja dan PT Bratasena. Apa yang terjadi dari investasi tersebut adalah yang diperoleh bangsa Indonesia bukannya

manfaat, tetapi malah nestapa. Akibat ketidakeresman mana- jemen bisnis, perusahaan ter- sebut akhirnya hancur sehingga ribuan tenaga kerja telantar dan ribuan hektar lahan bu- didaya menjadi usak parah.

Pembangunan kelautan

Dengan penjelasan di atas se- sungguhnya dapat dikatakan bahwa GMB bukanlah gerakan pembangunan kelautan, tetapi hanyalah gerakan pembangu- an perikanan. Gerakan pemba- ngunan perikanan merupakan bagian dari gerakan pembangu- an kelautan. Indonesia se- bagai negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, sudah se- mestinya meningkatkan kapa- sitas pendayagunaan dan pe- manfaatan sumber daya laut untuk kepentingan kesejahte- reraan dan kemakmuran rakyat.